

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
KELAUTAN DAN PERIKANAN, SERTA PANGAN)**

Tahun Sidang : 2015-2016
Masa Persidangan : II
Rapat Ke- : 04
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perum BULOG

Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Kamis, 19 November 2015
Waktu : Pukul 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta

Acara : Membahas RKA-K/L dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2016

Ketua Rapat : Edhy Prabowo, MM., MBA
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo
Hadir : A. 41 Anggota dari 49 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Dr.Ir. Andi Amran Sulaiman, MP. (Menteri Pertanian);
2. Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan);
3. Dr.Ir. Siti Nurbaya, M.Sc. (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan); dan
4. Drs. Djarot Kusumayakti, MM. (Direktur Utama Perum BULOG) beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perum BULOG dalam rangka membahas RKA-K/L dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2016, pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 dibuka pukul 10.00 WIB oleh Ketua Rapat Edhy Prabowo, MM., MBA dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu RKA-K/L Kementerian Pertanian Tahun 2016 sebesar Rp31.507.186.127.000,- yang bersumber dari:
 - a. Rupiah Murni sebesar Rp30.996.568.007.000,-;
 - b. PNBPNon BLU sebesar Rp85.786.922.000,- dan PNBPNon BLU sebesar Rp26.332.810.000,-;
 - c. Pinjaman Luar Negeri Rp379.598.388.000,-; dan
 - d. Hibah Luar Negeri sebesar Rp18.900.000.000,-.

dengan rincian per-Eselon I sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.634.662.112.000,-;
- b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp100.393.898.000,-;
- c. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp7.686.256.407.000,-;
- d. Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar Rp1.240.515.926.000,-;
- e. Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar Rp1.917.993.750.000,-;
- f. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp2.297.093.874.000,-;
- g. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp11.069.300.141.000,-;
- h. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebesar Rp2.124.989.941.000,-;
- i. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebesar Rp1.676.230.420.000,-;
- j. Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp783.064.320.000,-; dan
- k. Badan Karantina Pertanian sebesar Rp976.685.338.000,-.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melakukan pendalaman bersama Eselon I terkait fungsi dan program yang telah dipaparkan.

2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pertanian Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.941.542.030.000,- yang terdiri atas usulan alokasi DAK Provinsi sebesar Rp711.468.820.000,- dan DAK Kabupaten/Kota sebesar Rp3.230.073.210.000,-. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mereformulasikan kebijakan atas pengalokasian Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas Pagu RAPBN Tahun 2016 sebesar Rp6.113.936.955.000,- yang bersumber dari:
 - a. Rupiah Murni sebesar Rp4.824.917.588.000,-;
 - b. PNB/BLU sebesar Rp1.158.821.038.000,-; dan
 - c. Hibah Luar Negeri sebesar Rp130.198.329.000,-.

dengan rincian per-Eselon I sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp900.414.369.000,-;
- b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp71.171.368.000,-;
- c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sebesar Rp347.100.000.000,-;
- d. Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung sebesar Rp939.807.027.000,-;
- e. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebesar Rp1.317.378.000.000,-;
- f. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebesar Rp344.930.000.000,-;
- g. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi sebesar Rp318.259.500.000,-;
- h. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp360.838.691.000,-.
- i. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebesar Rp219.173.000.000,-;
- j. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp241.800.000.000,-;
- k. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim sebesar Rp857.105.000.000,-;
- l. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya sebesar Rp88.880.000.000,-;
- m. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebesar Rp107.080.000.000,-;

Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melakukan pendalaman bersama Eselon I terkait fungsi dan program yang telah dipaparkan.

4. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 sebesar Rp1.602.042.510.000,- yang dialokasikan untuk DAK Sub Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp822.748.550.000,- dan DAK Sub Bidang Kehutanan sebesar Rp779.293.960.000,-. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mereformulasikan kebijakan atas pengalokasian Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).

5. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan atas Pagu RAPBN Tahun 2016 sebesar Rp13.801.192.731.000,- yang bersumber dari:
 - a. Rupiah Murni sebesar Rp13.254.041.277.000,-;
 - b. PNPB sebesar Rp63.614.049.000,-;
 - c. Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp418.783.998.000,- dan
 - d. Hibah Luar Negeri sebesar Rp64.753.407.000,-dengan rincian per-Eselon I sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp442.557.657.000,-;
 - b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp98.966.176.000,-;
 - c. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebesar Rp3.513.629.229.000,-;
 - d. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebesar Rp1.676.038.704.000,-;
 - e. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.814.669.841.000,-;
 - f. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.838.304.293.000,-;
 - g. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebesar Rp1.411.472.567.000,-;
 - h. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.446.679.775.000,-;
 - i. Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan sebesar Rp888.929.232.000,-; dan
 - j. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sebesar Rp669.945.257.000,-.Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melakukan pendalaman bersama Eselon I terkait fungsi dan program yang telah dipaparkan.

6. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kelautan dan perikanan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.285.522.980.000,-. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mereformulasikan kebijakan atas pengalokasian Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).

7. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Perum BULOG atas usulan Pagu Subsidi Raskin Tahun 2016 sebesar **Rp25.090.664.058.363,-** dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Subsidi Raskin sebesar **Rp20.309.754.437.582,-** yang meliputi:
 - Sasaran : 15.530.897 RTS
 - Alokasi : 15 Kg/RTS/bulan
 - Durasi : 12 bulan
 - HPB : Rp8.865,-/kg
 - Harga tebus : Rp1.600,-/kg
 - Subsidi harga : Rp7.265,-/kg
 - b. *Margin Fee* sebesar **Rp726.845.979.600,-** yang meliputi:
 - Kuantum Raskin : 2.795.561.460 kg
 - Tarif *Margin* : Rp260,-/kg

- c. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar **Rp2.000.000.000.000,-**.
 - d. Kurang bayar Subsidi Raskin Tahun 2013 sebesar **Rp543.813.273.240,-**.
 - e. Kurang bayar Subsidi Raskin Tahun 2014 sebesar **Rp1.510.250.367.941,-**.
8. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk mereformulasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2016 bidang pertanian, bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta bidang kelautan dan perikanan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.30 WIB.

KOMISI IV DPR RI
KETUA RAPAT,

Ttd.

EDHY PRABOWO, MM., MBA.
A-335

MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN,

Ttd.

DR. IR. SITI NURBAYA, M.SC.

MENTERI PERTANIAN,

Ttd.

DR. IR. ANDI AMRAN SULAIMAN, MP.

MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

DIREKTUR UTAMA
PERUM BULOG,

Ttd.

DRS. DJAROT KUSUMAYAKTI, MM.

